

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2017  
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.400462/2017**

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (005)    | MAHKAMAH AGUNG  |
| 2. Unit Organisasi            | : (03)     | DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM                                    |
| 3. Provinsi                   | : (08)     | SUMATERA BARAT  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (400462) | PENGADILAN NEGERI MUARO   |
| Sebesar                       | : Rp.      | 97.450.000 ( SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

	Jumlah Uang
Rp.	97.450.000
Rp.	97.450.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

- |                               |     |            |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 97.450.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB                        |     |            | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 0          | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
|                               |     |            | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0          | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0          | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0          | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                   |           |            |
|-------------------|-----------|------------|
| 1. KPPN SIJUNJUNG | (077) Rp. | 97.450.000 |
|-------------------|-----------|------------|

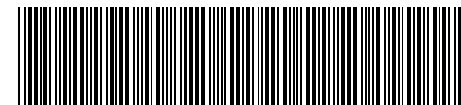
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Jakarta, 07 Desember 2016  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2017  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400462/2017  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1683-5730-1501-3244

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT  
Kode>Nama Satker : (400462) PENGADILAN NEGERI MUARO

Kuasa Pengguna Anggaran : ERITASRIZAL, SH  
Bendahara Pengeluaran : DINI OKTORINA, SE  
Pejabat Penanda Tangan SPM : M. YATIM

Halaman : I A. 1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		97.450.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN		97.450.000
2 Program	005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		97.450.000
Hasil (Outcome)	01	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum		
IKU Program	01	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel		
	02	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum		
	03	Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan umum		
	04	Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi		
Kegiatan	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		97.450.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum		
	002	Jumlah Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum		
	003	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan		
	004	Jumlah Penyelesaian Perkara PHI (di bawah 150 jt) di Lingkungan Peradilan Umum		
	005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara		
	006	Tenaga Teknis Peradilan Umum yang Kompeten dibidang Gugatan Sederhana (SCC) dan SIPP		
Keluaran (Output)	007	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu		
	008	Penyelesaian Perkara Perikanan		
	009	Pelaksanaan SPPT/SPPA/MEDIASI/SCC		
	1049.003	Pos Bantuan Hukum	240,00 Jam Layanan	24.000.000
	1049.004	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan	90,00 Perkara	30.200.000
	1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	128,00 Perkara	41.790.000
1049.006	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara	2,00 Perkara	1.460.000	

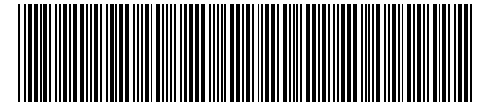
Jakarta, 07 Desember 2016  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.

Herri Swantoro, SH, MH  
195909041984031004



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2017  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400462/2017  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1683-5730-1501-3244

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT  
Kode>Nama Satker : (400462) PENGADILAN NEGERI MUARO  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400462	PENGADILAN NEGERI MUARO	-	97.450	-	-	-	97.450		
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	97.450	-	-	-	97.450		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	97.450	-	-	-	97.450		
1049.003	Pos Bantuan Hukum	-	24.000	-	-	-	24.000	08 . 13	
01	RM	-	24.000	-	-	-	24.000	077	
1049.004	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan	-	30.200	-	-	-	30.200	08 . 13	
01	RM	-	30.200	-	-	-	30.200	077	
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	-	41.790	-	-	-	41.790	08 . 13	
01	RM	-	41.790	-	-	-	41.790	077	
1049.006	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara	-	1.460	-	-	-	1.460	08 . 13	
01	RM	-	1.460	-	-	-	1.460	077	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>97.450</b>	-	-	-	<b>97.450</b>		

Jakarta, 07 Desember 2016  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.  
Herri Swantoro, SH, MH  
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2017  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400462/2017  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1683-5730-1501-3244

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT  
Kode>Nama Satker : (400462) PENGADILAN NEGERI MUARO

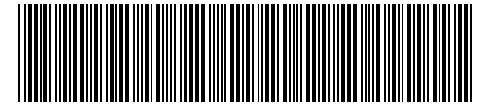
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	400462	<b>PENGADILAN NEGERI MUARO</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	897	1.988	3.489	5.340	5.613	6.237	10.827	10.534	11.421	11.655	13.049	16.400	97.450
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	897	1.988	3.489	5.340	5.613	6.237	10.827	10.534	11.421	11.655	13.049	16.400	97.450
	005.03.07.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	897	1.988	3.489	5.340	5.613	6.237	10.827	10.534	11.421	11.655	13.049	16.400	97.450
		52 BELANJA BARANG	897	1.988	3.489	5.340	5.613	6.237	10.827	10.534	11.421	11.655	13.049	16.400	97.450

Jakarta, 07 Desember 2016  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.  
Herri Swantoro, SH, MH  
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2017  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400462/2017  
IV. C A T A T A N**



DS:1683-5730-1501-3244

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT  
Kode dan Nama Satker : [400462] PENGADILAN NEGERI MUARO

Halaman : IV. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 07 Desember 2016  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.  
Herri Swantoro, SH, MH  
195909041984031004